

Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional

Irwan Triadi *¹
Akhfa Kamilla Sulaeman ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, Indonesia
*e-mail: irwantriadi1@yahoo.com¹, akhfakamilla@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menyajikan sebuah tinjauan kritis terhadap peran hukum tata negara dalam konteks pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional pada era kontemporer. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan politik, sosial, dan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum tata negara dalam menegakkan fondasi konstitusional suatu negara. Melalui pendekatan analitis, penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan dan putusan hukum terkini terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, serta menjaga integritas konstitusi. Melalui pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan, penelitian ini mencermati bagaimana interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional telah berkembang seiring waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Dengan menganalisis perubahan normatif dan interpretatif, penelitian ini menggali perspektif baru terkait efektivitas hukum tata negara dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara dan menjaga keseimbangan antarkekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Serta, penelitian ini mencoba memberikan solusi konstruktif untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum tata negara, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan dinamika zaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kritis hukum tata negara dalam menghadapi tantangan kontemporer, sekaligus menawarkan pandangan untuk memperkuat landasan konstitusional suatu negara.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Konstitusional, Prinsip, Kontemporer, Peran

Abstract

This research presents a critical review of the role of constitutional law in the context of the implementation of constitutional principles in the contemporary era. Taking into account the dynamics of political, social and economic change, this research aims to identify the challenges and opportunities faced by constitutional law in upholding a country's constitutional foundations. Through an analytical approach, it explores the impact of recent policy and legal decisions on the balance of power, the protection of individual rights, and maintaining the integrity of the constitution. Through an in-depth understanding of relevant case law, it examines how the interpretation and implementation of constitutional principles have evolved over time. The research method used is normative juridical, while the type of research is library research, the activity is carried out by collecting data related to the title which is literature. By analyzing normative and interpretative changes, this research explores new perspectives on the effectiveness of constitutional law in ensuring the protection of citizens' rights and maintaining the balance of power within the system of government. Also, this research tries to provide constructive solutions to improve and strengthen the constitutional law framework, in line with the demands of society and the dynamics of the times. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the critical role of constitutional law in facing contemporary challenges, as well as offering views to strengthen the constitutional foundation of a country.

Keywords: Constitutional Law, Constitutional, Principles, Contemporary, Role

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah Hukum Tata Negara atau HTN berasal dari gabungan kata “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara.¹ Hukum adalah seperangkat

¹ Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 18

aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi.² Dengan kata lain, pengertian hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.³

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis atau yang hidup dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan:⁴ konstitusi mengenai kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara; institusi kekuasaan negara beserta fungsinya; mekanisme hubungan antara institusi itu; dan prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.

Peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional memiliki relevansi yang krusial dalam konteks perkembangan masyarakat kontemporer. Pergeseran dinamis dalam politik, ekonomi, dan sosial telah memunculkan berbagai tantangan baru yang mempengaruhi efektivitas hukum tata negara sebagai landasan konstitusional suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi politik dan perubahan normatif telah menciptakan lingkungan hukum yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas menuntut peran hukum tata negara untuk dapat beradaptasi dan memberikan jawaban yang memadai terhadap perubahan tersebut.

Pentingnya mengevaluasi kembali peran hukum tata negara dalam perspektif kontemporer sangatlah mendesak. Melalui peninjauan kritis terhadap bagaimana hukum tata negara berfungsi dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusional, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta mengidentifikasi inovasi dan solusi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum tata negara dalam menanggapi kompleksitas tantangan modern. Dengan pemahaman mendalam terhadap peran hukum tata negara dalam konteks kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembaharuan hukum tata negara untuk mendukung sistem pemerintahan yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan politik, ekonomi, dan sosial kontemporer mempengaruhi peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh hukum tata negara dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional di era kontemporer?
3. Bagaimana interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional telah berevolusi seiring perubahan normatif dan interpretatif dalam konteks hukum tata negara?
4. Apa dampak kebijakan dan putusan hukum terkini terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, serta menjaga integritas konstitusi?

Tujuan

1. Pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Tata Negara
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum tata negara dalam menegakkan fondasi konstitusional suatu negara.
3. Untuk memahami dampak kebijakan dan putusan hukum terkini terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, serta menjaga integritas konstitusi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan.⁵ Pendekatan yuridis normatif

² Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hal. 2

³ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 18

⁴ Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017, hal. 11

⁵ Abdi Mirzaqon T. dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", dalam *Jurnal BK UNESA*, (Jawa Timur: UNESA), 8(1), hlm. 3-4

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁶ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui pentingnya memahami cara meningkatkan Integritas sebagai mahasiswa dan memahami wujud bela negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial Kontemporer Memengaruhi Peran Hukum Tata Negara dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan di Dalam Sistem Pemerintahan

Perkembangan politik, ekonomi, dan sosial kontemporer memiliki dampak signifikan terhadap peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, konsep Negara Hukum atau "Rechtsstaat" yang dirumuskan dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002 menekankan pentingnya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi. Ini mencerminkan prinsip 'the rule of law, not of man', di mana pemerintahan dianggap sebagai hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.⁸

Konsep Negara Hukum di Indonesia juga mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Supremasi hukum menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum yang paling tinggi, dengan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga dan penerjemah akhir konstitusi. Persamaan dalam hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hukum dan pemerintahan, sementara asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹ Dalam praktiknya, transparansi dan kontrol sosial terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum menjadi penting untuk menjamin keadilan dan kebenaran. Ini mencakup partisipasi langsung masyarakat dalam proses hukum, yang penting untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam mekanisme kelembagaan resmi.

Konsep Negara Hukum juga menekankan pentingnya demokrasi dalam pengambilan keputusan politik, dengan mekanisme pemilihan pejabat publik yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini mencerminkan prinsip 'democratische rechtsstaat', di mana hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.¹⁰

Secara keseluruhan, perkembangan politik, ekonomi, dan sosial kontemporer mempengaruhi peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menekankan pada prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, kontrol sosial, dan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi juga menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

⁶ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id

⁷ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

⁸ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, "Dinamika Politik Kontemporer", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 49

⁹ Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

¹⁰ Ahmad Dahlan dan Muhammad Wildan, "Ekonomi Politik", (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm.81

Tantangan utama yang dihadapi oleh hukum tata negara dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional di era kontemporer

Hukum tata negara dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional di era kontemporer menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk :

1. Perubahan Konstitusi : Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Perubahan ini terjadi sebagai respons atas dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Namun, perubahan konstitusi juga menimbulkan tantangan, seperti perdebatan tentang substansi perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional.
2. Konflik antara Kebijakan Pemerintah dan Hak Asasi Manusia: Salah satu tantangan yang sering muncul adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi dapat menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusional.¹¹
3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi : Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat juga menjadi tantangan bagi konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun implementasinya masih banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam praktiknya.
4. Korupsi : Korupsi menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin pemberantasan korupsi, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara efektif.¹²
5. Multikulturalisme : Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan agama. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan menghargai keragaman budaya. Namun, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana mengelola perbedaan dan keragaman ini secara harmonis dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik dan diskriminasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat sistem pengawasan terhadap tindakan pejabat publik, dan memperkuat independensi lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga supremasi hukum, seperti lembaga peradilan dan lembaga pengawas.¹³

Interpretasi dan Implementasi Prinsip-Prinsip Konstitusional Berevolusi dalam Konteks Hukum Tata Negara

Interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional telah berevolusi seiring perubahan normatif dan interpretatif dalam konteks hukum tata negara, dengan beberapa perubahan penting :

1. Penggunaan Hermeneutika Hukum : Hermeneutika hukum menekankan pentingnya interpretasi hukum yang berbasis moral dan etika, dengan tujuan untuk mewujudkan moralitas dalam hukum. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mewujudkan moralitas, dan interpretasi hukum harus dilakukan dengan keinginan baik, memahami dan mencermati semangat yang terkandung di dalamnya, serta mencari pesan bagi zaman sekarang.
2. Pentingnya Interpretasi Konstitusional : Interpretasi konstitusional menjadi aktivitas yang inheren dalam berbagai wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam judicial review. Ini mencakup pengujian undang-undang tidak hanya menilai apakah bagian, pasal,

¹¹ Muhammad Ragil. (2023, 6 Mei). Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.kompasiana.com/muhamadragil4907/64559d8ea7e0fa063117f474/dinamika-dan-tantangan-konstitusi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-indonesia>

¹² Ibid

¹³ Umi Zuhriyah, (2023, 28 November). Apa Tujuan Konstitusi dan Kedudukannya di Indonesia?. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://tirto.id/apa-tujuan-konstitusi-dan-kedudukannya-di-indonesia-gSGm>

atau ayat dalam UU bertentangan dengan UUD atau tidak, tetapi juga ketika menerapkan kaidah-kaidah konstitusi atau undang-undang dasar, maka hakim harus memutuskan makna kaidah-kaidah tersebut.¹⁴

3. Peran MK Sebagai Penjaga Konstitusi, Interpreter, dan Pelindung HAM : Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi, interpreter, dan pelindung HAM. Ini mencerminkan konsekuensi dari materi muatan konstitusi, yang mengandung konsep fundamental seperti pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme).
4. Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Konstitusi : Diskusi tentang pemisahan kekuasaan dan pembagian konstitusi menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan dianggap kurang tepat, dengan argumen bahwa kemerdekaan peradilan tidak ada jika ada pemisahan. Sebaliknya, pembagian kekuasaan menekankan pada prinsip kedaulatan dan pembagian konstitusi, serta jenis hierarki dalam sistem pemerintahan.¹⁵
5. *Open Legal Policy* : Konsep *open legal policy* menunjukkan bahwa interpretasi hukum dan konstitusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan publik yang lebih besar. Ini mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir, seperti tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya keyakinan yang baik dan akal sehat, serta mempertimbangkan hak-hak istimewa atau pengutamaan tanpa merugikan bagi mereka yang tidak memiliki hak istimewa atau yang tidak diutamakan itu.¹⁶

Dengan demikian, interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional telah berevolusi untuk mencakup pendekatan yang lebih inklusif, moral, dan etika, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan publik. Ini mencerminkan perubahan normatif dan interpretatif dalam konteks hukum tata negara, dengan fokus pada penafsiran hukum yang berbasis moral dan etika, serta penerapan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih inklusif dan adil.

Dampak Kebijakan dan Putusan Hukum Terhadap Keseimbangan Kekuasaan, Perlindungan Hak-Hak Individu, serta Menjaga Integritas Konstitusi

Kebijakan dan putusan hukum terkini memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan menjaga integritas konstitusi, yaitu :

1. Keseimbangan Kekuasaan : Kebijakan dan putusan hukum yang memperkuat demokrasi, seperti pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah, serta memperkuat hak asasi manusia dapat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan. Ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Perlindungan Hak-Hak Individu : Kebijakan dan putusan hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak atas keadilan, sangat penting untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dari penyalahgunaan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.¹⁷
3. Menjaga Integritas Konstitusi : Kebijakan dan putusan hukum yang memperkuat prinsip-prinsip konstitusional, seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan asas legalitas, sangat penting untuk menjaga integritas konstitusi. Ini mencakup pengawasan

¹⁴ Radian Salman. Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=1768>

¹⁵ Fakhris Lutfianto dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution". Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/5644/0>

¹⁶ Zulqadri Anand, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem

Ketatanegaraan Indonesia". Diakses pada 23 Maret 2024, dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/386/343>

¹⁷ Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1833/pdf/4544>

terhadap penerapan hukum yang sesuai dengan konstitusi, serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional.¹⁸

Secara keseluruhan, kebijakan dan putusan hukum terkini memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan menjaga integritas konstitusi. Penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah untuk terus memperkuat prinsip-prinsip ini melalui kebijakan dan putusan hukum yang adil dan berimbang.

KESIMPULAN

Perkembangan politik, ekonomi, dan sosial kontemporer memiliki dampak signifikan terhadap peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Konsep Negara Hukum di Indonesia juga mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Supremasi hukum menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum yang paling tinggi, dengan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga dan penerjemah akhir konstitusi. Persamaan dalam hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hukum dan pemerintahan, sementara asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, transparansi dan kontrol sosial terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum menjadi penting untuk menjamin keadilan dan kebenaran. Ini mencakup partisipasi langsung masyarakat dalam proses hukum, yang penting untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam mekanisme kelembagaan resmi.

Konsep Negara Hukum juga menekankan pentingnya demokrasi dalam pengambilan keputusan politik, dengan mekanisme pemilihan pejabat publik yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini mencerminkan prinsip 'democratische rechtsstaat', di mana hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan politik, ekonomi, dan sosial kontemporer mempengaruhi peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menekankan pada prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, kontrol sosial, dan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi juga menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Dalam konteks tersebut, penting untuk diingat bahwa keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan menjaga integritas konstitusi merupakan prinsip-prinsip yang saling terkait dan saling mendukung dalam menjaga stabilitas dan kemajuan suatu negara. Kebijakan dan putusan hukum yang diambil haruslah diarahkan untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut demi kepentingan bersama. Penguatan keseimbangan kekuasaan melalui kebijakan dan putusan hukum yang memperkuat demokrasi dan pengawasan terhadap pemerintah menjadi landasan yang kuat dalam menjaga stabilitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah juga menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Sementara itu, menjaga integritas konstitusi melalui kebijakan dan putusan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional adalah pondasi utama dalam memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati. Dengan demikian, kebijakan dan putusan hukum yang diambil haruslah senantiasa memperkuat prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan menjaga integritas konstitusi. Hanya dengan demikian, sebuah negara dapat berkembang secara berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

¹⁸ Jurnal Konstitusi volume 16 Nomor 1, Maret 2019. Diakses pada 24 Maret 2024, dari https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/52/pdf_3

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ahmad Dahlan dan Muhammad Wildan, "Ekonomi Politik", (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 81 <https://repository.uinsaizu.ac.id/19311/1/Buku%202022%20-%20Ekonomi%20Politik.pdf>
- Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, "Dinamika Politik Kontemporer", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 49 <http://eprints.ipdn.ac.id/2475/1/BUKU%20-%20DINAMIKA%20POLITIK%20KONTEMPORER.pdf>

Jurnal

- Dian Aries Mujiburohman. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Fakhris Lutfianto dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution". Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/5644/0>
- Jurnal Konstitusi volume 16 Nomor 1, Maret 2019. Diakses pada 24 Maret 2024, dari https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/52/pdf_3
- Siphotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1833/pdf/4544>
- T., Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK UNESA*, 8(1), 3-4. Diakses pada 23 November 2023, dari UNESA.
- Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id
- Zulqadri Anand, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Diakses pada 23 Maret 2024, dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/download/386/343>

Website

- Muhammad Ragil. (2023, 6 Mei). Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.kompasiana.com/muhamadragil4907/64559d8ea7e0fa063117f474/dinamika-dan-tantangan-konstitusi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-indonesia>
- Radian Salman. Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=1768>
- Renata Christha. (2023, 5 Oktober). Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli-lt62eb69953366e/>
- Umi Zuhriyah, (2023, 28 November). Apa Tujuan Konstitusi dan Kedudukannya di Indonesia?. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://tirto.id/apa-tujuan-konstitusi-dan-kedudukannya-di-indonesia-gSGm>